



PEMERINTAH KOTA BANJAR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjar Tahun 2025. Rencana Kerja disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dengan disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Semoga di tahun yang akan datang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan bagi perangkat daerah maupun masyarakat dalam mendukung pencapaian Pembangunan di Kota Banjar.

Banjar, 4 Agustus 2025

Kepala BPKPD,



ASEP MULYANA, S.E., M.M.

Pembina TK I / IVb

NIP. 19761004 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2 Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	56
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	60
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V PENUTUP	91

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 : Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Gambar 1.3 : Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2025
- Tabel 2.2 : Jumlah ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pangkat
- Tabel 2.3 : ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
- Tabel 2.4 : ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.5 : Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
- Tabel 2.6 : Daftar Kendaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
- Tabel 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Tabel 2.8 : Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026
- Tabel 3.2 : Rumus Capaian Indikator Kinerja
- Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
- Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Banjar maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja. Dokumen tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaian terhadap RKPD Pemerintah Kota Banjar. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Banjar, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Wali Kota Banjar dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

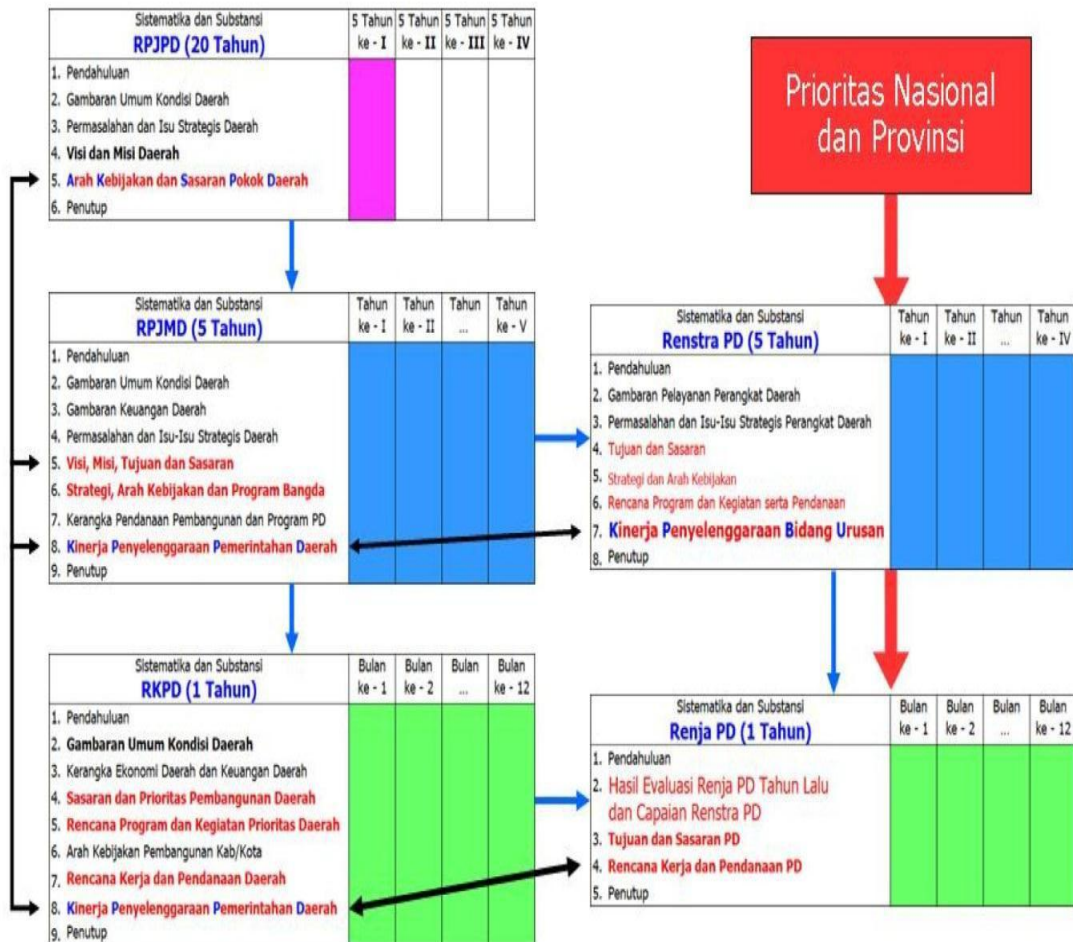
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

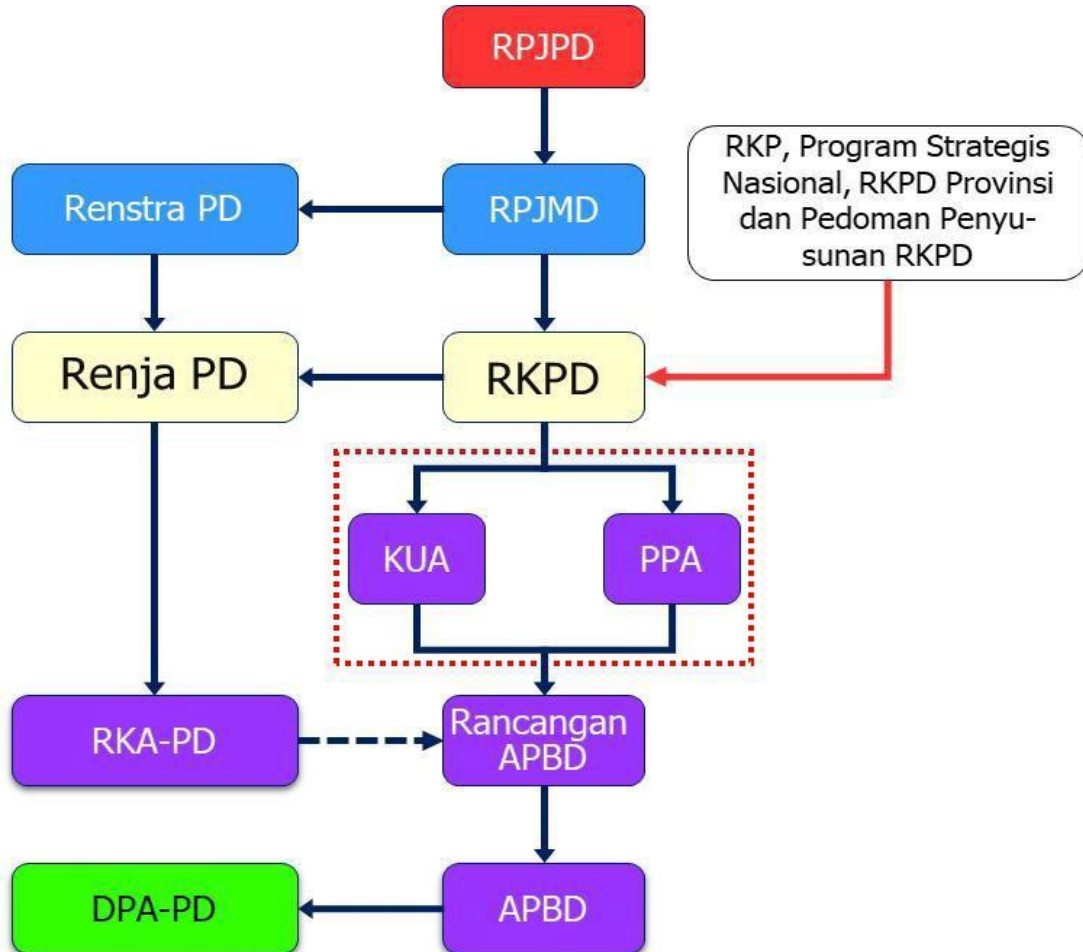
Di bawah ini bagan alir proses penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah :

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
41. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjar, (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);

42. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 6.a);
43. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
44. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 33).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kota Banjar.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar;
3. Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan Renja K/L dan RKPD Kota Banjar, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2024-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan/atau realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai

Berisikan uraian mengenai:

3. Tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan

7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan
 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah, paling sedikit mencakup urusan/program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu perkiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar selama Tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan tabel Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN				
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02	KEUANGAN											
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	13,0 %	37,68 %	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	12,5 %	37,50 %	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	28,57 %
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Lap	8 Lap	8 Lap	100 %	8 Lap	13 Lap	54,17 %
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	5 Lap	41,67 %
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	25,14 %	41,71 %	
5	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 Orang/ Bln	56 Orang/ Bln	56 Orang/ Bln	100 %	54 Orang/ Bln	54 Orang/ Bln	125 %
5	2	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105 Dok	350 Dok	1101 Dok	315 %	350 Dok	1265 Dok	120,48 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN					
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4				
5	2	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap		2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	2 Lap	33,33 %
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	33,33 %
5	2	1	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	11,11 %
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	12,5 %	37,50 %
5	2	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	522 Stel							%
5	2	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	165 Dok		12 Dok	12 Dok	100 %	54 Dok	66 Dok	40,00 %
5	2	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Org							%
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Org					0 Org	0 Org	0,00 %
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	15,0 %	38,33 %
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	15 Paket	41,67 %
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	12 Paket	33,33 %
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	15 Paket	41,67 %
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	15 Paket	41,67 %
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	12 Paket	33,33 %
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	324 Dok		Dok	Dok	%	60 Dok	0 Dok	0,00 %
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Lap		12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	12 Lap	33,33 %
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap		12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	15 Lap	41,67 %
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dok		12 Dok	12 Dok	100 %	12 Dok	15 Dok	41,67 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			6 Dok	6 Dok	100 %	12 Dok	9 Dok	%
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	33,33 %
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	88 Unit		10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit		%
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit		9 Unit	9 Unit	100 %	10 Unit	9 Unit	16,67 %
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		Unit	Unit	%			%
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	25,0 %	41,67 %
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap		12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	15 Lap	41,67 %
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lap		12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	15 Lap	41,67 %
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	14,24 %	38,08 %
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 Unit		25 Unit	25 Unit	100 %	25 Unit	50 Unit	49,02 %
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102 Unit		5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	10 Unit	9,80 %
5 02 01 2.09 04	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	180 Unit					44 Unit	0 Unit	0,00 %
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit		127 Unit	127 Unit	100 %	96 Unit	161 Unit	89,44 %
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	3 Unit	20,00 %
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	17,63 %	39,21 %
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	15,0 %	38,33 %
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	60 Dok	66,67 %
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	3 Dok	50,00 %
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Org		100 Org	100 Org	100 %	100 Org	100 Org	33,33 %
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	20,85 %	40,28 %
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	228 Dok		76 Dok	76 Dok	100 %	76 Dok	107 Dok	46,93 %
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya								
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dok		78 Dok	78 Dok	100 %	78 Dok	120 Dok	51,28 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN					
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4			
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dok		4 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	5 Dok	41,67 %
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	144 Lap		48 Lap	48 Lap	100 %	48 Lap	48 Lap	33,33 %
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	114 Dok		38 Dok	38 Dok	100 %	38 Dok	48 Dok	42,11 %
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15 Dok		5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	5 Dok	33,33 %
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	360 Orang		120 Orang	120 Orang	100 %	120 Orang	120 Orang	33,33 %
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	25,0 %	41,67 %
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Dok		12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	15 Lap	41,67 %
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	36 Lap		12 Lap	12 Lap	100 %	12 Dok	15 Dok	41,67 %
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	246 Lap		82 Lap	82 Lap	100 %	82 Dok	123 Dok	50,00 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dok					1 Dok	0 Dok	0,00 %
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	9,67 %	36,56 %
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap		1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	33,33 %
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Lap		1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	33,33 %
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	48 Lap		16 Lap	16 Lap	100 %	16 Lap	16 Lap	33,33 %
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	15,0 %	38,33 %
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	15,0 %	38,33 %
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	9 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	11,11 %
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Lap		4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	5 Lap	41,67 %
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	6 Lap		1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	16,67 %
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	65 Lap		10 Lap	10 Lap	100 %	10 Lap	14 Lap	21,54 %
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	27 Dok		9 Dok	9 Dok	100 %	9 Dok	9 Dok	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2023	TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15 Lap		6 Lap	6 Lap	100 %	6 Lap	6 Lap	40,00 %
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6 Lap		2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	2 Lap	33,33 %
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	123 Org		41 Org	41 Org	100 %	41 Org	41 Org	33,33 %
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	15,63 %	38,54 %
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300 %		100 %	100 %	100 %	100 %	15,63 %	38,54 %
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Lap		4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	5 Lap	41,67 %
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	33,33 %
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Lap		1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	33,33 %
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	2 Dok	66,67 %
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %

Berikut uraian tabel 2.1 di atas:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% atau dengan predikat kinerja “sangat tinggi”, sehingga tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Sedangkan tingkat capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2024 sampai dengan Tahun 2025 (sampai dengan triwulan II) sebesar 47,97% dengan predikat kinerja masih sangat rendah. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra dan sampai dengan saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar masih melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target yang telah direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tingkat capaian kinerja program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 mencapai 100% sehingga telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Sedangkan sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, capaian kinerja sebesar 47,97% dan masih dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga belum dapat diukur capaian kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tingkat capaian kinerja program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 mencapai 100% sehingga telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Sedangkan sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, capaian kinerja sebesar 47,97% dan masih dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga belum dapat diukur capaian kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Tingkat capaian kinerja program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 mencapai 100% sehingga telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Adapun faktor penyebab terpenuhinya kinerja program/kegiatan yaitu adanya koordinasi yang baik antar unit kerja yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga capaian kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, capaian kinerja sebesar 47,97% dan masih dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Salah satu faktor penyebab terkendalanya pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu keterbatasan anggaran pengadaan personal komputer yang menyebabkan beberapa pegawai belum mendapatkan fasilitas komputer sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang maksimal. Selanjutnya keterbatasan anggaran bimbingan teknis sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN dalam peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana transfer yang menuntut adanya kemandirian fiskal Pemerintah Daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Sejauh ini capaian program Renstra Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan masih dilaksanakan sehingga belum ada kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

Sejauh ini kegiatan dan sub kegiatan masih dilaksanakan sehingga belum ada kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 3 (Ayat) 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, BPKPD Kota Banjar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;
- f. Pembinaan ASN pada badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021, disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar merupakan tipe A yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang. Susunan Organisasi BPKPD Kota Banjar terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Pelayanan;
 - 2) Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran II;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
- 1) Sub Bidang Kas Daerah
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
- 1) Sub Bidang AKLAP I;
 - 2) Sub Bidang AKLAP II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- h. Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 367 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, jenis pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pajak Daerah Lainnya;
2. Layanan Perencanaan Barang Milik Daerah;
3. Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap);
4. Layanan Aset Persediaan (Aset Lancar);
5. Layanan Penyaluran dan Pelaporan DAK Fisik;
6. Layanan Penyaluran dan Pelaporan DAK Non Fisik;
7. Layanan Penyaluran dan Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi;
8. Layanan Penyaluran dan Pelaporan Insentif Fiskal;
9. Layanan Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer Pusat (DAU BG dan DBH);
10. Layanan Penatausahaan;

11. Layanan Penatausahaan Pengeluaran Digital;
12. Layanan Penganggaran;
13. Layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
14. Layanan Perbankan dari BJB;
15. Layanan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
16. Layanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
17. Layanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - a. Sumber Daya Manusia Aparatur memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun data Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Fungsional	Pejabat Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1	I	-	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	-	2	2
3	III	-	-	8	7	24	39
4	IV	1	6	3	-	-	10
Sub Jumlah		1	6	11	7	26	51
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)							
5	I	-	-	-	-	10	10
6	V	-	-	-	-	15	15
7	VII	-	-	-	1	3	4
8	IX	-	-	-	3	17	20
Sub Jumlah		-	-	-	4	45	49
Jumlah		1	6	11	11	71	100

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berdasarkan golongan/ ruang mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki golongan III sebanyak 39 (tiga puluh

sembilan) orang, golongan II sebanyak 2 (dua) orang, serta golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) golongan I sebanyak 10 (Sepuluh) orang, V sebanyak 15 (lima belas) orang, VII sebanyak 4 (empat) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) golongan IX sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Tabel 2.3
ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1	I	-	-	-
2	II	2	-	2
3	III	22	17	39
4	IV	6	4	10
Sub Jumlah I		30	21	51
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
5	I	10	-	10
6	V	10	5	15
7	VII	3	1	4
8	IX	10	10	20
Sub Jumlah II		33	16	49
Jumlah		63	37	100

Berdasarkan jenis kelaminnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, sedangkan sisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.4
ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SD	10	-	10
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	15	5	20
4	D-3	6	2	8
5	D-4	-	1	1
6	S-1	26	22	48

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
7	S-2	6	7	13
Jumlah		63	37	100

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berpendidikan SD sebanyak 10 (Sepuluh) orang, SLTA sebanyak 20 (dua puluh) orang, Sarjana Muda (D-3) sebanyak 8 (delapan) orang, D-4 sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dan Magister (S-2) sebanyak 13 (tiga belas) orang.

b. Aset/Modal

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar cukup memadai, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
1	Transportable Generating Set	1	1		-
2	P.C Unit	65	43		22
3	Lap Top	17	14	2	1
4	Note Book	5	5	-	-
5	Tablet PC	32	13		19
6	Personal Komputer lainnya	2	2		-
7	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	1		-
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	3		-
9	Monitor	8	8		-
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	42	13	23
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	1	2	-
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	3	-	-
13	Server	10	10	-	-
14	Router	1	1	-	-
15	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	1	-	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
16	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	8	-	-
17	Pick Up	1	1	-	-
18	Sepeda Motor	19	19	-	-
19	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	1	-	-
20	alat ukur universal lainnya (dst)	3	-	-	3
21	Scanner (Universal Tester)	7	7	-	-
22	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	10	10	-	-
23	Rak-Rak Penyimpan	4	4	-	-
24	Mesin Fotocopy Electronic	6	6	-	-
25	Lemari Kayu	8	3	-	5
26	Rak Besi	32	32	-	-
27	Rak Kayu	7	7	-	-
28	Filing Cabinet Besi	19	19	-	-
29	Brandkas	5	5	-	-
30	CCTV - Camera Control Television System	6	6	-	-
31	Papan Visual/Papan Nama	49	48	-	1
32	Alat Penghancur Kertas	7	1	-	6
33	Mesin Absensi	1	-	-	1
34	Perforator Besar	2	1	-	1
35	Overhead Projector	1	1	-	-
36	LCD Projector/Infocus	1	1	-	-
37	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	-	-
38	Papan Nama Instansi	135	135	-	-
39	Papan Pengumuman	106	106	-	-
40	Alat Kantor Lainnya	1	1	-	-
41	Meja Kerja Kayu	31	31	-	-
42	Kursi Besi/Metal	13	13	-	-
43	Meja Rapat	23	23	-	-
44	Meja Resepsionis	2	2	-	-
45	Meja 1/2 Biro	35	35	-	-
46	Kursi Rapat	116	72	-	44
47	Kursi Tamu	4	2	-	2
48	Kursi Putar	15	-	-	15

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
49	Kursi Biasa	28	10	-	18
50	Sofa	15	13	1	1
51	Meubeleur lainnya	1	1	-	-
52	Mesin Pemotong Rumput	3	2	-	1
53	Lemari Es	2	2	-	-
54	A.C. Window	15	10	-	5
55	A.C. Split	33	11	2	20
56	Kipas Angin	2	-	2	-
57	Televisi	5	2	-	3
58	Loudspeaker	2	-	1	1
59	Sound System	2	-	1	1
60	Wireless	1	-	-	1
61	Camera Video	1	1	-	-
62	Tangga Aluminium	1	1	-	-
63	Dispenser	2	1	-	1
64	Coffee Maker	2	2	-	-
65	Alat Pemadam/Portable	11	11	-	-
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	15	-	-
68	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	10	-	-
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	-	1	4
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	1	-	13
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	41	30	-	11
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-
73	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	19	-	-
74	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	4	-	-
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	-	3	-
76	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	-	-	1
77	Camera Electronic	1	1	-	-
78	Facsimile	1	1	-	-
79	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	1	-	-
80	Stabilizer	1	1	-	-
81	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
82	Generator	1	1	-	-
	Jumlah	1.162	910	28	224

Tabel 2.6

Daftar Kendaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

No	Jenis Kendaraan	Merk	Ukuran/ cc	No Polisi	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
1	Pick Up	Suzuki / Carry 1,5 Pick Up Flat Deck	1493		Z 8048 X
2	Mini Bus	Toyota // Kijang Inova	1998		Z 1272 X
3	Mini Bus	Toyota / Avanza Type 1.5 M/T Veloz	1495	Z 155 X	Z 1816 X
4	Mini Bus	Toyota / Avanza Type 1.5 M/T Veloz	1495	Z 156 X	Z 1817 X
5	Mini Bus	Suzuki / Suzuki Futura ST 120	1.493		Z 302 X
6	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 M/T	1.495		Z 1136 X
7	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 M/T	1495		Z 1151 X
8	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 Mt	1495		Z 1196 X
9	Mini Bus	Toyota / Kijang Inova 2.0g At (Tgn140r Mdtstk)	1998		Z 15 X
10	Mini Bus	Toyota / Kijang Grand Long KF 83	2446		Z 1276 X
11	Sepeda Motor	Yamaha / Vega-R	110		Z 2335 X
12	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2286 X
13	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2581 X
14	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2378 X
15	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 3p9	110		Z 2221 X
16	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2451 X
17	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R/3p9	110		Z 2485 X
18	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R/3p9	110		Z 2360 X
20	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 110 Cc 4d7	110		Z 2031 X
21	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2758 X
22	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2759 X
23	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2762 X
24	Sepeda Motor	Honda Revo / Cw	110		Z 2835 X

No	Jenis Kendaraan	Merk	Ukuran/ cc	No Polisi	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
25	Sepeda Motor	Honda / Nc1183ca/T	108		Z 2846 X
26	Sepeda Motor	Honda / Nc11a3ca/T	108		Z 2847 X
27	Sepeda Motor	Honda Vario	108		Z 2857 X
28	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3098 X
29	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3103 X
30	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3116 X
31	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3095 X

c. Inovasi Perangkat Daerah

Berikut beberapa inovasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar:

1. Pembayaran pajak daerah secara *online*, yaitu melalui website:
 - pajakdaerah.banjarkota.go.id untuk pajak reklame, hotel dan restoran;
 - ests.banjarkota.go.id untuk pembayaran retribusi daerah;
 - pembayaran melalui QRIS.
 - SIMPBB, SIMBPHTB, SIMPDL.
2. Pemasangan Tapping Box di Hotel, Restoran, dan Tempat Hiburan.
3. Aplikasi PAIS PEDDA Digital (pelayanan pengajuan Surat Perintah Membayar, pengajuan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/SKPP, penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian/DTH, penyampaian usulan Standar Biaya Umum/SBU dan Standar Satuan Harga/SSH).
4. SAUNG APBD (permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa berbasis *papperless*).
5. Aplikasi SIMSALABIMD (Sistem Informasi Pelaporan Barang Milik Daerah).

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	-	100%	
	- Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	- Realisasi Belanja APBD			93%	94%	95%	92,64%	58,69%	95%	
	- LKPD sesuai dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Penetapan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	- Laporan BMD sesuai dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Realisasi Pajak Daerah			100%	100%	100%	97,79%	60,58%	100%	
	- Pertumbuhan Pajak Daerah			2,5%	2,5%	2,5%	23,32%	-	2,5%	
3	Kategori SAKIP OPD			BB 73,08	BB 74,08	BB 76,08	BB 73,51	A 82,21	BB 76,08	
	- Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD			0,8%	1%	2%	2,07%	11,84%	2%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar tahun 2024-2026 yaitu:

1. Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-1 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran ke-1.1 yaitu Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel. Berdasarkan tabel di atas, Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu, Realisasi Belanja APBD dengan target 93%, LKPD sesuai dan tepat waktu dengan target 100%, Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target Tepat Waktu dan Laporan BMD sesuai dan tepat waktu dengan target 100%. Adapun capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penetapan APBD;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Banjar menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara “Tepat Waktu” pada tanggal 29 Desember 2023.

- 2) Realisasi belanja APBD;

Realisasi belanja APBD Pemerintah Kota Banjar sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp786.164.478.466,00 atau 92,64% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp848.609.500.710,00. Realisasi belanja APBD belum mencapai target capaian kinerja sebesar 93% dikarenakan masih besarnya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat sehingga pengeluaran belanja disesuaikan dengan tingkatan prioritas yang menyebabkan terdapatnya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak direalisasikan secara maksimal serta masih diperlukannya langkah langkah untuk optimalisasi PAD agar ketergantungan transfer dana dari pemerintah pusat semakin berkurang dan peningkatan pemahaman dalam penyusunan perencanaan agar memperhatikan skala prioritas dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Banjar sehingga penerimaan yang ada optimal, tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat dalam merealisasikan perencanaan yang telah disusun.

3) LKPD sesuai dan tepat waktu;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar disampaikan tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024.

4) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Banjar disampaikan tepat waktu ke DPRD Kota Banjar pada tanggal 11 Juni 2024.

5) Laporan BMD sesuai dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar disampaikan tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024. Untuk optimalisasi dalam penyusunan Laporan BMD salah satunya terfokus pada pensertifikatan aset aset yang menjadi milik Pemerintah Kota Banjar.

Sedangkan Tahun 2025, capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1) Penetapan APBD;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banjar ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024. Dalam pelaksanaan penetapan APBD tergantung dari ketepatan waktu dalam menyusun dokumen perencanaan. Diharapkan konsistensi dari mulai penyusunan RKPD, penyusunan KUA PPAS samapai dengan penetapan APBD.

2) Realisasi belanja APBD;

Realisasi belanja APBD sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025 sebesar 56,42%. Jumlah realisasi anggaran belanja sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025 adalah sebesar Rp448.409.082.594,00 atau sebesar 56,42% dari anggaran sebesar Rp794.704.184.027,00. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan adanya efisiensi anggaran serta adanya keterbatasan anggaran kas di RKUD dikarenakan disesuaikan dengan penerimaan yang masuk ke RKUD baik dana dari Transfer Pusat maupun dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) LKPD sesuai dan tepat waktu;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan surat penyampaian Nomor T/900.1.15.5/1317/BPKPD/2025 tanggal 24 Maret 2025.

4) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan surat Wali Kota Banjar Nomor T/900.1.3/2506/SETDA/2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disampaikan pada tanggal 25 Juni 2025. Sedangkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 30 Juli 2025.

5) Laporan BMD sesuai dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan surat penyampaian nomor T/900.1.15.5/1317/BPKPD/2025 tanggal 24 Maret 2025.

2. Realisasi Pajak Daerah

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-2 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusi, dengan sasaran 2.2 yaitu Optimalisasi Potensi PAD. Indikator Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjar adalah Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target 2,5%.

Realisasi pajak Daerah Tahun 2024 sebesar 97,79% atau sebesar Rp25.381.245.689,00 dari target sebesar Rp25.955.251.000,00. Realisasi pajak daerah Pemerintah Kota Banjar sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp25.381.245.689,00 atau naik sebesar 23,32% jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp20.580.904.903,00

Sedangkan realisasi pajak daerah Pemerintah Kota Banjar sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.591.349.015,00 atau sebesar 56,09% dari target Rp40.280.516.402,00. Indikator pertumbuhan pajak daerah dari tahun lalu dapat diukur setelah tahun 2025 berakhir.

3. Kategori Nilai SAKIP OPD

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-1 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran ke-1.1 yaitu Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel. Indikator Kinerja SAKIP OPD Tahun Anggaran 2024 pada BPKPD Kota Banjar adalah Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD dengan target 0,8%.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD adalah sebesar 2,07%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023 nomor R/700.1.2.5/SI/Itda/2024 tanggal 6 Mei 2024 memperoleh nilai AKIP sebesar 73,51 dengan kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik atau mengalami kenaikan 2,07% dibandingkan dengan nilai AKIP Tahun 2022 sebesar 72,02

Sedangkan capaian nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI) Tahun 2025 nomor: R/700.1.2.1/84/Itda/2025 tanggal 28 Mei 2025 memperoleh nilai sebesar “82,21” dengan predikat “A”. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan telah melakukan perbaikan yang signifikan dan memiliki sistem yang baik dalam pengelolaan kinerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, BPKPD memiliki lingkup layanan yang luas. Sebagai fungsi penunjang urusan keuangan, BPKPD memberikan pelayanan dalam proses penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BPKPD didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Berikut capaian kinerja atas pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar maupun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sebagaimana tercantum pada tabel 2.7. Realisasi

kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% atau dengan predikat kinerja “sangat tinggi”, sehingga tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Sedangkan tingkat capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025 (sampai dengan triwulan II) sebesar 47,97% dengan predikat kinerja masih sangat rendah. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra dan sampai dengan saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar masih melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target yang telah direncanakan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD Kota Banjar sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan Kebijakan Teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan Administrasi Badan;
- 6) Pembinaan ASN pada Badan; dan
- 7) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Wali Kota Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan (gap) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Selain itu, permasalahan juga dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan diperoleh dari hasil identifikasi data

kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar menghadapi beberapa isu strategis yang harus di antisipasi dan dikelola. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Namun demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Kriteria yang dikembangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menentukan isu-isu yang ada menjadi isu strategis antara lain meliputi:

- 1) Pengaruhnya terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar;
- 2) Merupakan tupoksi organisasi;
- 3) Memiliki dampak terhadap pelayanan publik;
- 4) Memiliki dampak terhadap laporan keuangan (Opini BPK);
- 5) Memiliki dampak terhadap pembangunan;
- 6) Tingkat kesulitan untuk diantisipasi;

Dalam upaya mencapai target kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kemampuan fiskal daerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD serta dapat menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan dalam mencapai target;
- 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan serta pengelola barang milik daerah pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjar belum optimal;
- 3) Belum optimalnya kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam upaya meminimalisir permasalahan yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak, identifikasi, pendataan terhadap subjek dan objek pajak baru, pemasangan alat rekam pajak serta penambahan channel pembayaran pajak daerah.
- 2) Melakukan desk penyusunan rencana anggaran kas disesuaikan dengan proyeksi penerimaan kas pada seluruh perangkat daerah;
- 3) Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjar;
- 4) Membuat inovasi pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah maupun pengelolaan pajak daerah dalam upaya mendukung capaian kinerja;
- 5) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media sosial;

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar

Adapun dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kemampuan fiskal pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan;
- 2) Belum meratanya kompetensi SDM seluruh perangkat daerah berdampak pada proses pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah tidak berjalan optimal;
- 3) Belum optimalnya kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada kinerja pelayanan pada perangkat daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

- 1) Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

- a) Rendahnya kemampuan fiskal daerah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD serta dapat menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan dalam mencapai target;

- b) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang milik daerah pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjar;
 - c) Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* seiring dengan agenda reformasi birokrasi.
- 2) Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

- a) Penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- b) Peningkatan kompetensi SDM aparatur pengelola keuangan daerah;
- c) Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d) Peningkatan layanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah, yaitu dengan melakukan pembayaran secara *online*.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan di atas, maka isu-isu strategis yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sebagai berikut:

- 1) Upaya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan lainnya, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah;
- 2) Pengelolaan anggaran daerah secara efektif dan efisien serta pengendalian belanja daerah agar sesuai prioritas pembangunan daerah;
- 3) Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Peningkatan pengelolaan aset daerah yang meliputi inventarisasi, pemanfaatan serta pengamanan aset daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini, terdapat perubahan maupun penambahan program dan kegiatan, hal tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta hasil analisis kinerja serta kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Banjar Tahun 2025-2029.

Tabel 2.8
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KEUANGAN					90.537.398.311,00						97.937.398.311,00
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,5%	17.578.504.471,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,5%	17.478.205.921,00	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	20.812.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	20.810.800,00	Berkurang menyesuaikan ASB
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.841.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.841.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	1.841.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	1.841.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2.239.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2.238.000,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.841.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.841.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2.239.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2.238.000,00	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap	8.070.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap	8.070.000,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	2.741.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	2.741.800,00	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	14.588.106.271,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	14.502.843.121,00	Berkurang menyesuaikan jumlah PNS dan PPPK
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	14.503.259.721,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	14.403.259.721,00	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.582.950,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	98.319.800,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.263.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.263.600,00	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	39.222.500,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	52.401.000,00	Bertambahnya Kendaraan dan Operasional Penjaga Gedung
01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	39.222.500,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	52.401.000,00	
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	253.067.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	107.987.400,00	Berkurang karena tidak dianggarkannya pendidikan dan pelatihan pegawai
01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	58.067.400,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	62.987.400,00	
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	-	
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	45.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	45.000.000,00	
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	711.477.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	754.943.400,00	Bertambahnya operasional karena selaku PPKD dan kenaikan tarif SSH
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.256.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.256.000,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.236.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.989.600,00	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	33.334.000,00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.420.900,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.799.200,00	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	86.014.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	86.014.000,00	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dok	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	133 Dok	6.000.000,00	
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	14.656.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	14.656.000,00	
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	216.889.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	216.889.000,00	
09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	86.005.600,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	86.005.600,00	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	166.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	166.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	357.368.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	536.369.000,00	Bertambahnya CPNS dan PPPK
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.538.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.538.000,00	
02	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	66.730.000,00	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	119.000.000,00	
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	254.100.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	380.831.000,00	
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	709.845.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	620.175.200,00	Berkurang karena belanja Internet pindah ke Kominfo
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	648.631.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	620.175.200,00	
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.214.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	898.604.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	882.676.000,00	Berkurang menyesuaikan ASB
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	301.674.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	275.350.000,00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	78.555.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	92.790.000,00	
03	Pemeliharaan Mebel	BPKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	44 Unit	11.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	BPKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	41 Unit	11.000.000,00	
04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	224.010.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	224.000.000,00	
05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	228.342.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	228.342.000,00	
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.023.400,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	51.194.000,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD			70.807.531.840,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD			78.307.830.890,00	
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	56,62%				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	56,62%		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	11,93%				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	11,93%		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	93%				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	93%		
			Persentase Penurunan SILPA	0,39%				Persentase Penurunan SILPA	0,39%		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	100%	732.400.650,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	100%	877.031.350,00	Penyesuaian kebutuhan anggaran belanja
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	89.256.500,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.956.500,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	89.274.250,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.974.250,00	
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	42.229.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	42.534.000,00	
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	41.376.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	42.969.000,00	
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	61.221.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	68.419.000,00	
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	32.168.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	62.868.000,00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	157.024.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	190.115.800,00	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	145.051.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	155.402.500,00	
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49.942.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49.942.300,00	
10	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	24.856.300,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	24.850.000,00	
02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	100%	540.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	100%	540.000.000,00	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dokumen	110.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dokumen	110.000.000,00	
02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	75.000.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	75.000.000,00	
03	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	150.000.000,00	
04	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	15.000.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	48 Laporan	40.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	48 Laporan	40.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
06	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	10.000.000,00	
07	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	65.000.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	65.000.000,00	
08	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	10.000.000,00	
09	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	65.000.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	65.000.000,00	
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	670.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	670.000.000,00	
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	30.000.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	30.000.000,00	
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Dokumen	40.000.000,00	
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Dokumen	160.000.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Dokumen	160.000.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	2 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	2 Dokumen	100.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten/Kota			Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten/Kota			
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	20.000.000,00	
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	
08	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	150.000.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	150.000.000,00	
09	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 Lembaga	100.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 Lembaga	100.000.000,00	
04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	68.865.131.190,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	76.220.799.540,00	Bertambahnya alokasi Belanja Tidak Terduga
01	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	60.447.975.977,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	60.447.975.977,00	
02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.239.820.500,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.595.488.850,00	
03	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	5.177.334.713,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	5.177.334.713,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1,76%	786.378.600,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1,76%	786.378.600,00	
01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen laporan Barang Milik Daerah	100%	786.378.600,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen laporan Barang Milik Daerah	100%	786.378.600,00	
01	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	
02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	
03	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	
04	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	162.267.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	162.267.000,00	
05	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	69.299.200,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	69.299.200,00	
06	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	253.893.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	253.893.000,00	
07	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	54.336.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	54.336.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	38.152.500,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	38.152.500,00	
09	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	7.636.400,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	7.636.400,00	
10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	13.794.500,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	13.794.500,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	22,83%	1.364.983.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	22,83%	1.364.982.900,00	
01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.364.983.400,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.364.982.900,00	
01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	18.761.500,00	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	18.761.000,00	
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	23.593.250,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	23.593.250,00	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	186.844.500,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	186.844.500,00	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	104.550.900,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	104.550.900,00	
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	15.334.600,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	15.334.600,00	
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	73.945.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	73.945.000,00	
07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	92.985.800,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	92.985.800,00	
08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	500 Layanan	7.523.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	500 Layanan	7.523.000,00	
09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	14.531.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	14.531.000,00	
10	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	471.276.250,00	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	471.276.250,00	
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	7.903.000,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	7.903.000,00	
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	49.214.100,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	49.214.100,00	
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.315.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.315.500,00	
14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	281.205.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	281.205.000,00	

Berdasarkan tabel di atas, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 90 (sembilan puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp97.937.398.311,00.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi Rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sebagai berikut:

No	Usulan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana Prasarana Kolektor PBB dan Sub Kolektor PBB	Desa Cibeureum, Kota Banjar	Masih sering terjadinya keterlambatan Pembayaran dan Pelunasan PBB – P2	-	Tidak dapat dianggarkan, karena keterbatasan anggaran
2.	Pemutakhiran Data Tanah	Blok 8-15 Desa Cibeureum, Kota Banjar	Pemekaran wilayah Desa, sehingga peta blok tanah kurang akurat.	-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3.	Sarana Prasarana Kolektor PBB dan Sub Kolektor PBB	Tersebar se-Kelurahan Hegarsari, Kota Banjar	Penyesuaian pajak PBB berdasarkan lokasi tanah merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan.	-	Penyesuaian tidak memerlukan biaya karena termasuk dalam pelayanan PBB
4.	Sarana Prasarana Kolektor PBB dan Sub Kolektor PBB	Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, Kota Banjar	Kurangnya sarana prasarana (kendaraan bermotor) bagi kolektor dalam pemungutan kepada wajib pajak	-	Tidak dapat dianggarkan, karena keterbatasan anggaran
5.	Pemutakhiran Data Tanah	se Desa Batulawang, Kota Banjar	Data Tanah banyak bermasalah sehingga PBB WP/OP nya banyak yang tidak sesuai	-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6.	Sarana Prasarana Kolektor PBB dan Sub Kolektor PBB	Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, Kota Banjar	Kurangnya pengetahuan SDM tentang Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan bagi kolektor PBB	-	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 mengusung beberapa misi presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah 2025-2029. Misi presiden disebut sebagai Asta Cita dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 memuat 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Jabar Istimewa dengan slogan "Lembur Diurus Kota Ditata". Istimewa merupakan situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa: pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Dalam mencapai visi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menentukan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional;
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean governance*);

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menentukan program unggulan yang disebut dengan 9 Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yang terdiri dari:

1. Langkah Kahiji: Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, Pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (*Open Defecation Free*/bebas buang air besar sembarangan).

2. Langkah Kedua: Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya;
3. Langkah Katilu: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat;
4. Langkah Kaopat: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan;
5. Langkah Kalima: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat;
6. Langkah Kagenep: Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan;
7. Langkah Katujuh: Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan;
8. Langkah Kadalapan: Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
9. Langkah Kasalapan: Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, LInmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Berdasarkan Pasal 5 (Ayat) 1 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;
- f. Pembinaan ASN pada badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mendukung pelaksanaan misi ke 4 (empat) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ”Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance)”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang hendak dicapai adalah “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”. Untuk mencapai visi Kota Banjar tersebut, dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah. Pada Tahun 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar memiliki tujuan utama yaitu “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dalam pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Sasaran 1 : Ketepatan Waktu Penyusunan APBD
Indikator Sasaran 2 : Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D
Indikator Sasaran 3 : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Sasaran 4 : Ketepatan Waktu Penyampaian RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Sasaran 1 : Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai dan tepat waktu
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Sasaran 1 : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Indikator Sasaran 1 : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- Indikator Sasaran 2 : Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Tepat Waktu
		Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	100%
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat Waktu
		Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai dan tepat waktu	100%
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,57%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,5%		

Adapun perhitungan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tabel tersebut diatas diperoleh dengan rumus indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumus Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR	RUMUS
(1)	(2)	(3)
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar
2	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR	RUMUS
(1)	(2)	(3)
3	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	$\frac{\sum Usulan Pencairan}{\sum Penerbitan SP2D} \times 100\%$
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir</p>
5	Ketepatan Waktu Penyampaian RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir</p>
6	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai dan tepat waktu	$\frac{\sum Laporan BMD Sesuai dan Tepat Waktu}{\sum Perangkat Daerah} \times 100\%$
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\sum Realisasi PAD Tahun n - \sum Realisasi PAD Tahun n - 1)}{\sum Realisasi PAD Tahun n - 1} \times 100\%$
8	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a
9	Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	$\frac{(\text{Nilai SAKIP Tahun } n - \text{Nilai SAKIP Tahun } n-1)}{\text{Nilai SAKIP Tahun } n-1} \times 100\%$

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Adapun pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar disesuaikan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 90 (sembilan puluh) sub kegiatan, dengan uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersebar ke berbagai wilayah se-Kota Banjar

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD ;
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD ;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - 10) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - 4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 6) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - 7) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - 8) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
 - 9) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - 6) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 7) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - 8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 9) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga;
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- 8) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - 9) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - 10) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - 1) Perencanaan Pengelolaan pajak daerah;
 - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - 7) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - 8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - 9) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - 10) Penagihan Pajak Daerah;
 - 11) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - 12) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
 - 13) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 14) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

B. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Mebel;
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3. Jika Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tahun 2026 telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebutuhan anggaran akan sangat berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai pendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, adapun ketidaksesuaian pagu anggaran yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, maka pemenuhan kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan.

4. Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah		0,5%	17.478.205.921,00			0,5%	17.370.556.271,00
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	20.810.800,00			100%	21.852.900,00
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	2 Dokumen	1.841.000,00	DAU		2 Dokumen	1.933.000,00
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	2 Dokumen	1.841.000,00	DAU		2 Dokumen	1.933.200,00
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	2 Dokumen	2.238.000,00	DAU		2 Dokumen	2.351.500,00
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPKPD	2 Dokumen	1.841.000,00	DAU		2 Dokumen	1.933.200,00
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	2 Dokumen	2.238.000,00	DAU		2 Dokumen	2.351.500,00
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	8 Dokumen	8.070.000,00	DAU		8 Dokumen	8.474.000,00
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	4 Dokumen	2.741.800,00	DAU		4 Dokumen	2.876.500,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	14.502.843.121,00			100%	14.588.169.371,00
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	100 Orang/Bulan	14.403.259.721,00	PAD, DAU		100 Orang/Bulan	14.503.259.721,00
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	12 Dokumen	98.319.800,00	DAU		12 Dokumen	83.582.950,00
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	2 Laporan	1.263.600,00	DAU		2 Laporan	1.326.700,00
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	52.401.000,00			100%	39.222.500,00
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	1 Dokumen	52.401.000,00	DBH		1 Dokumen	39.222.500,00
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	107.987.400,00			100%	103.067.400,00
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	12 Dokumen	62.987.400,00	DAU		12 Dokumen	58.067.400,00
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKPD	100 Orang	-	DAU		100 Orang	-
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	7 Orang	45.000.000,00	DAU		7 Orang	45.000.000,00
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	754.943.400,00			100%	713.640.500,00
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKPD	12 Paket	43.256.000,00	DAU		12 Paket	45.419.000,00
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKPD	12 Paket	65.989.600,00	DAU		12 Paket	32.236.000,00
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPKPD	12 Paket	33.334.000,00	DAU		12 Paket	30.000.000,00
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKPD	12 Paket	36.799.200,00	DAU		12 Paket	30.420.900,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKPD	12 Paket	6.014.000,00	DAU		12 Paket	86.014.000,00
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPKPD	133 Dokumen	6.000.000,00	DAU		133 Dokumen	6.000.000,00
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	12 Laporan	14.656.000,00	DAU		12 Laporan	14.656.000,00
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	12 Laporan	216.889.000,00	DAU		12 Laporan	216.889.000,00
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	12 Dokumen	86.005.600,00	DAU		12 Dokumen	86.005.600,00
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	12 Dokumen	166.000.000,00	DAU		12 Dokumen	166.000.000,00
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	536.369.000,00			100%	357.368.000,00
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPKPD	1 Unit	36.538.000,00	DAU		1 Unit	36.538.000,00
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPKPD	110 Unit	119.000.000,00	DAU		110 Unit	66.730.000,00
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKPD	29 Unit	380.831.000,00	DAU		29 Unit	254.100.000,00
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	620.175.200,00			100%	648.631.200,00
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKPD	12 Laporan	620.175.200,00	DBH		12 Laporan	648.631.200,00
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKPD	12 Laporan	-	DAU		12 Laporan	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	882.676.000,00			100%	898.604.400,00
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKPD	22 Unit	275.350.000,00	DAU		22 Unit	301.674.000,00
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKPD	7 Unit	92.790.000,00	DAU		7 Unit	78.555.000,00
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPKPD	41 Unit	11.000.000,00	DAU		41 Unit	11.000.000,00
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKPD	127 Unit	224.000.000,00	DAU		127 Unit	224.010.000,00
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKPD	5 Unit	228.342.000,00	DAU		5 Unit	228.342.000,00
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKPD	2 Unit	51.194.000,00	DAU		2 Unit	55.023.400,00
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				78.307.830.890,00				70.807.531.840,00
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		56,62%				56,12%	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		11,93%				11,94%	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		93%				94%	
		Persentase Penurunan SILPA		0,39%				0,08%	
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%				100%	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah		100,00%	877.031.350,00			100,00%	1.049.751.650,00
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKPD	2 Dokumen	119.956.500,00	DAU		2 Dokumen	119.956.500,00
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKPD	2 Dokumen	119.974.250,00	DAU		2 Dokumen	119.974.250,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	42.534.000,00	DAU		30 Dokumen	103.629.500,00
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	42.969.000,00	DAU		30 Dokumen	102.776.000,00
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	68.419.000,00	DAU		30 Dokumen	91.921.500,00
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	62.868.000,00	DAU		30 Dokumen	62.868.000,00
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	2 Dokumen	190.115.800,00	DAU		2 Dokumen	218.424.800,00
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	2 Dokumen	155.402.500,00	DAU		2 Dokumen	155.402.500,00
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	1 Dokumen	49.942.300,00	DAU		1 Dokumen	49.942.300,00
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	100 Orang	24.850.000,00	DAU		100 Orang	24.856.300,00
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Kas Daerah		100,00%	540.000.000,00			100,00%	540.000.000,00
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	76 Dokumen	110.000.000,00	DAU		76 Dokumen	110.000.000,00
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	78 Dokumen	75.000.000,00	DAU		78 Dokumen	75.000.000,00
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	4 Dokumen	150.000.000,00	DAU		4 Dokumen	150.000.000,00
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	DAU		1 Dokumen	15.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	48 Laporan	40.000.000,00	DAU		48 Laporan	40.000.000,00
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	DAU		1 Dokumen	10.000.000,00
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	38 Dokumen	65.000.000,00	DAU		38 Dokumen	65.000.000,00
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	5 Dokumen	10.000.000,00	DAU		5 Dokumen	10.000.000,00
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	120 Orang	65.000.000,00	DAU		120 Orang	65.000.000,00
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100,00%	670.000.000,00			100,00%	670.000.000,00
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	12 Laporan	50.000.000,00	DAU		12 Laporan	50.000.000,00
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	DAU		1 Dokumen	30.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	12 Dokumen	40.000.000,00	DAU		12 Dokumen	40.000.000,00
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKPD	82 Dokumen	160.000.000,00	DAU		82 Dokumen	160.000.000,00
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	DAU		2 Dokumen	100.000.000,00
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	DAU		1 Dokumen	20.000.000,00
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	DAU		1 Dokumen	20.000.000,00
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	120 Orang	150.000.000,00	DAU		120 Orang	150.000.000,00
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BPKPD	12 Lembaga	100.000.000,00	DAU		12 Lembaga	100.000.000,00
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		100,00%	76.220.799.540,00			100,00%	68.547.780.190,00
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	1 Laporan	60.447.975.977,00	DAU, DD		1 Laporan	60.447.975.977,00
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	1 Laporan	10.595.488.850,00	DAU, DBH		1 Laporan	2.922.469.500,00
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	16 Laporan	5.177.334.713,00	PAD		16 Laporan	5.177.334.713,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		1,76%	786.378.600,00			1,77%	786.378.600,00
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen laporan Barang Milik Daerah		100,00%	786.378.600,00			100,00%	786.378.600,00
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	DAU		2 Dokumen	100.000.000,00
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	DAU		1 Dokumen	7.000.000,00
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	DAU		1 Dokumen	80.000.000,00
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	1 Laporan	162.267.000,00	DAU		1 Laporan	162.267.000,00
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKPD	1 Laporan	69.299.200,00	DAU		1 Laporan	69.299.200,00
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	4 Laporan	253.893.000,00	DAU		4 Laporan	253.893.000,00
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	4 Dokumen	54.336.000,00	DAU		4 Dokumen	54.336.000,00
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	5 Laporan	38.152.500,00	DAU		5 Laporan	38.152.500,00
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKPD	2 Laporan	7.636.400,00	DAU		2 Laporan	7.636.400,00
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	41 Orang	13.794.500,00	DAU		41 Orang	13.794.500,00
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	22,83%		1.364.982.900,00			23,28%	1.364.983.400,00
5 02 04 2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		100,00%	1.364.982.900,00			100,00%	1.364.983.400,00
5 02 04 2.02 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	2 Dokumen	18.761.000,00	PAD		2 Dokumen	18.761.500,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 04 2.02 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	23.593.250,00	PAD		1 Dokumen	23.593.250,00
5 02 04 2.02 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	4 Laporan	186.844.500,00	PAD		4 Laporan	186.844.500,00
5 02 04 2.02 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	1 Unit	104.550.900,00	PAD		1 Unit	104.550.900,00
5 02 04 2.02 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	1 Laporan	15.334.600,00	PAD		1 Laporan	15.334.600,00
5 02 04 2.02 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	1 Laporan	73.945.000,00	PAD		1 Laporan	73.945.000,00
5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	92.985.800,00	PAD		1 Dokumen	92.985.800,00
5 02 04 2.02 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	500 Layanan	7.523.000,00	PAD		500 Layanan	7.523.000,00
5 02 04 2.02 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BPKPD	1 Dokumen	14.531.000,00	PAD		1 Dokumen	14.531.000,00
5 02 04 2.02 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	471.276.250,00	PAD		1 Dokumen	471.276.250,00
5 02 04 2.02 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	7.903.000,00	PAD		1 Dokumen	7.903.000,00
5 02 04 2.02 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	49.214.100,00	PAD		1 Dokumen	49.214.100,00
5 02 04 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKPD	1 Laporan	17.315.500,00	PAD		1 Laporan	17.315.500,00
5 02 04 2.02 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPD	1 Laporan	281.205.000,00	PAD		1 Laporan	281.205.000,00
JUMLAH TOTAL					97.937.398.311,00				90.329.450.111,00

Berdasarkan data tabel di atas, program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 terdiri dari:

1. Pagu Indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp17.478.205.921,00. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
2. Pagu Indikatif Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp78.307.830.890,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan;
3. Pagu Indikatif Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar Rp786.378.600,00. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan;
4. Pagu Indikatif Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp1.364.982.900,00. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase Pertumbuhan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,5%	17.478.205.921,00	17.370.556.271,00		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	20.810.800,00	21.852.900,00		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.841.000,00	1.933.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.841.000,00	1.933.200,00	DAU	
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.238.000,00	2.351.500,00	DAU	
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.841.000,00	1.933.200,00	DAU	
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.238.000,00	2.351.500,00	DAU	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8.070.000,00	8.474.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.741.800,00	2.876.500,00	DAU	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	14.502.843.121,00	14.588.169.371,00		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	14.403.259.721,00	14.503.259.721,00	PAD, DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	98.319.800,00	83.582.950,00	DAU	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.263.600,00	1.326.700,00	DAU	
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100,00%	52.401.000,00	39.222.500,00		
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	52.401.000,00	39.222.500,00	DBH	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	107.987.400,00	103.067.400,00		
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	62.987.400,00	58.067.400,00	DAU	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	BPKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	-	-	DAU	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	754.943.400,00	713.640.500,00		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.256.000,00	45.419.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.989.600,00	32.236.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	33.334.000,00	30.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.799.200,00	30.420.900,00	DAU	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	86.014.000,00	86.014.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	133 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.656.000,00	14.656.000,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	216.889.000,00	216.889.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	86.005.600,00	86.005.600,00	DAU	
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	166.000.000,00	166.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	536.369.000,00	357.368.000,00		
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.538.000,00	36.538.000,00	DAU	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Unit	119.000.000,00	66.730.000,00	DAU	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	380.831.000,00	254.100.000,00	DAU	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	620.175.200,00	648.631.200,00		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	620.175.200,00	648.631.200,00	DBH	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	DAU	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	882.676.000,00	898.604.400,00		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	275.350.000,00	301.674.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	92.790.000,00	78.555.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	BPKPD	BPKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	41 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	224.000.000,00	224.010.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	228.342.000,00	228.342.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	51.194.000,00	55.023.400,00	DAU	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					78.307.830.890,00	70.807.531.840,00		
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	56,62%				
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	11,93%				
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	93%				
				Persentase Penurunan SILPA	0,39%				
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%				
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	100,00%	877.031.350,00	1.049.751.650,00		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.956.500,00	119.956.500,00	PAD	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.974.250,00	119.974.250,00	PAD	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	42.534.000,00	103.629.500,00	DAU	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	42.969.000,00	102.776.000,00	DAU	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	68.419.000,00	91.921.500,00	DAU	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	62.868.000,00	62.868.000,00	DAU	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	OPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	190.115.800,00	218.424.800,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	OPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	155.402.500,00	155.402.500,00	DAU	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49.942.300,00	49.942.300,00	DAU	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	24.850.000,00	24.856.300,00	DAU	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	100,00%	540.000.000,00	540.000.000,00		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	OPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,00%	670.000.000,00	670.000.000,00		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100,00%	76.220.799.540,00	68.547.780.190,00		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Desa/Kel	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	60.447.975.977,00	60.447.975.977,00	DAU, DD	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.595.488.850,00	2.922.469.500,00	DAU, DBH	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	BPKPD	Desa/Kel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	5.177.334.713,00	5.177.334.713,00	PAD	
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1,76%	786.378.600,00	786.378.600,00		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase Pemenuhan Dokumen laporan Barang Milik Daerah	100,00%	786.378.600,00	786.378.600,00		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	OPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	162.267.000,00	162.267.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	69.299.200,00	69.299.200,00	DAU	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	253.893.000,00	253.893.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	54.336.000,00	54.336.000,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	38.152.500,00	38.152.500,00	DAU	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	7.636.400,00	7.636.400,00	DAU	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	13.794.500,00	13.794.500,00	DAU	
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	22,83%	1.364.982.900,00	1.364.983.400,00		
5 02 04 2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	1.364.982.900,00	1.364.983.400,00		
5 02 04 2.02 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	18.761.000,00	18.761.500,00	DAU	
5 02 04 2.02 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	23.593.250,00	23.593.250,00	DAU	
5 02 04 2.02 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	186.844.500,00	186.844.500,00	DAU	
5 02 04 2.02 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	104.550.900,00	104.550.900,00	DAU	
5 02 04 2.02 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	15.334.600,00	15.334.600,00	DAU	
5 02 04 2.02 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	73.945.000,00	73.945.000,00	DAU	
5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	92.985.800,00	92.985.800,00	DAU	
5 02 04 2.02 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	500 Layanan	7.523.000,00	7.523.000,00	DAU	
5 02 04 2.02 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	14.531.000,00	14.531.000,00	DAU	
5 02 04 2.02 11	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	471.276.250,00	471.276.250,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Keterangan
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 04 2.02 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	7.903.000,00	7.903.000,00	DAU	
5 02 04 2.02 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	49.214.100,00	49.214.100,00	DAU	
5 02 04 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	17.315.500,00	17.315.500,00	DAU	
5 02 04 2.02 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	281.205.000,00	281.205.000,00	DAU	
Jumlah Usulan Musrenbang (1)						-			
Jumlah Usulan Renja (2)						97.937.398.311,00	90.329.450.111,00		
Jumlah Usulan Pokir (3)						-			
Jumlah Total (1+2+3)						97.937.398.311,00	90.329.450.111,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Banjar yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Banjar. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja PD juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Banjar dan Wakil Wali Kota Banjar terpilih.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Banjar Tahun 2026;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dengan

- berpedoman kepada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 dan RKPD Kota Banjar Tahun 2026;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026 dengan Evaluasi pelaksanaan renja secara berkala (setiap triwulan) dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas khususnya dalam pelayanan pajak daerah dan optimalisasi penggunaan aset daerah.
 - e. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja masing masing ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN yang profesional.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selain sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Anggaran yang memadai dimanfaatkan sebaik mungkin guna melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja BPKPD sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Serta diharapkan dapat mewujudkan outcome dan output dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta ikut mendukung mewujudkan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar.

Disamping itu Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan nilai SAKIP;
3. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek dan sosialisasi untuk peningkatan kompetensi ASN;
4. Pelaksanaan dengan peningkatan digitalisasi pelayanan coaching dan mentoring untuk mewujudkan ASN yang professional;
5. Peningkatan digitalisasi dalam pelayanan pajak dan optimalisasi penggunaan aset daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, dalam rangka mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Serta mendukung Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean governance*);

Serta mendukung Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang hendak dicapai yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”. Dan mendukung misi :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

Adapun dukungan mencapai Indonesia emas, Visi dan Misi baik dari Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Banjar diimplementasikan dengan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Demikian Penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2026 yang telah disusun ini, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Banjar, 4 Agustus 2025

Kepala BPKPD,

ASEP MULYANA, S.E., M.M.

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19761004 200312 1 004